



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.458, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Perencanaan.
Pertahanan Negara.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pada era yang diwarnai terjadinya resesi keuangan global perlu penataan struktur dan Postur Pertahanan Negara yang berkesinambungan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor :PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a./M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Haneg) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
13. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 238);
14. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 0181/M.PPN/04/2010, SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2011.**

Pasal 1

Kebijakan Perencana Pertahanan Negara adalah dokumen perencanaan pembangunan pertahanan negara untuk 1 tahun, berisi tentang proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam periode 1 tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pasal 2

Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011 disusun berpedoman kepada Naskah Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 serta Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011.

Pasal 3

Prioritas pembangunan pertahanan negara berpedoman pada prioritas nasional Tahun 2011 dengan pendekatan *baseline* sehingga perumusan kebijakan, program dan kegiatan diarahkan untuk pemenuhan hak prajurit serta kebutuhan mendesak.

Pasal 4

Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dipedomani seluruh satuan kerja perencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara konsekuen dan konsisten.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2010
**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2010
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor : 19 Tahun 2010
Tanggal : 9 Juli 2010

KEBIJAKAN PERENCANAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2011

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Pembangunan Postur dan struktur pertahanan negara saat ini masih dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang bergerak cepat dan dinamis serta dalam fenomena ketersediaan anggaran yang terbatas. Permasalahan yang krusial dan mendasar yakni kapabilitas pertahanan belum menghasilkan tingkat *deterrence effect* sesuai kebutuhan.

Aspek utama kekuatan postur pertahanan nasional yang meliputi kualitas maupun kuantitas SDM, Alutsista dan non Alutsista serta sarana dan prasarana pertahanan negara, belum proporsional ditinjau dari segi kompetensi, teknologi dan masih belum sesuai nomenklatur/terminologi serta *standard operating procedure* militer yang baku.

Alutsista dan non Alutsista TNI rata-rata telah mencapai usia pakai antara 25-40 tahun, bahkan masih terdapat yang berusia antara 41-64 tahun; Kesiapan sistem persenjataan darat rata-rata di bawah 58,34%, sistem persenjataan laut di bawah 33,55%, dan sistem persenjataan udara rata-rata di bawah 40,29%.

- b. Dinamika dan kecenderungan lingkungan strategis internasional, kawasan dan regional senantiasa berpengaruh terhadap perkembangan pada tataran nasional. Isu demokratisasi berindikasi menurunnya rasa kebangsaan; isu otonomi daerah berdampak negatif timbulnya egosektoral dan kedaerahan yang primordialistis. Isu sentral lainnya pemulihan krisis finansial global; Kelangkaan energi, kegiatan ragam ilegal; Masih terdapat fenomena keterbelakangan, kebodohan, ketidakadilan dan kemiskinan, berimplikasi terhadap timbulnya

kesenjangan dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat.

Prediksi ancaman yang mungkin timbul berkaitan dengan : permasalahan perbatasan, separatisme, terorisme, radikalisme, kejahatan transnasional dan konflik komunal/horizontal serta bencana alam.

- c. Tahun 2011 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra Haneg) Tahun 2010-2014, dalam rangka melanjutkan pembangunan struktur dan postur pertahanan negara. Strategi pembangunan pertahanan militer diprioritaskan secara konsisten untuk pembangunan mewujudkan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) sesuai sasaran strategi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan pertahanan militer diprioritaskan untuk pemberdayaan industri pertahanan nasional, pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, peningkatan rasa aman masyarakat, modernisasi deteksi dini keamanan nasional, dalam rangka pembangunan *standard deterrence*.
- d. Rencana kebutuhan anggaran aktual sebesar 1,8% s.d. 2,1% PDB = $1,8\% \times \text{Rp } 6.178.253,98 \text{ M} = \text{Rp } 111.208,57 \text{ M}$ s.d. $2,1\% \times \text{Rp } 6.178.253,98 \text{ M} = \text{Rp } 129.743,33 \text{ M}$ (berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : PER/24/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Postur Pertahanan Negara). Ketersediaan anggaran dalam pagu indikatif lima tahunan sebesar Rp 44.883,00 M mencapai 0,68% PDB (berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014).
Ketersediaan anggaran pertahanan negara Tahun 2011 sebesar Rp 44.908,50 M mencapai 0,72% PDB (sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0181/M.PPN/04/2010, SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah/RKP Tahun 2011).
- e. Kapabilitas pertahanan saat ini dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan lingkungan strategis dan keterbatasan alokasi pagu anggaran yang tersedia, memerlukan strategi pembangunan pertahanan negara yang fokus dengan rumusan kebijakan yang disusun berupa rancangan hirarki prioritas yang tepat dan akurat, penancangan program dan pengalokasian anggaran yang realistis, dalam rangka penangkalan

maupun penindakan terhadap segala bentuk ancaman.

- f. Kebijakan yang meliputi hirarki prioritas tersebut, diselenggarakan dengan menetapkan prioritas bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) meliputi peningkatan kemampuan pertahanan menuju MEF, pemberdayaan industri pertahanan nasional, peningkatan rasa aman masyarakat dan modernisasi deteksi dini keamanan nasional. Dalam tataran kebijakan, strategis sampai dengan tingkat operasional, perwujudan prioritas pembangunan pertahanan, diimplementasikan ke dalam konsep susunan tugas TNI yang profesional, efisien, efektif dan modern untuk melanjutkan pembangunan MEF.

Prioritas bidang pertahanan dan pemenuhan kebutuhan mendesak pertahanan negara pada Tahun 2011 diarahkan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional.

2. Maksud dan Tujuan. Maksud penyusunan naskah ini untuk memberikan gambaran tentang sasaran, kebijakan prioritas dan rencana anggaran pertahanan, dengan tujuan agar kebijakan perencanaan pembangunan pertahanan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.
3. Dasar.
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 - c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405).

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406).
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
 - h. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
 - i. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01.a./M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008.
 - j. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara.
 - k. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (SPP Haneg).
 - l. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.
 - m. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 0181/M.PPN/04/2010, SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2011.
4. Ruang Lingkup. Ruang lingkup Naskah Kebijakan Perencanaan Pertahanan ini meliputi landasan, kecenderungan perkembangan lingkungan strategis dan pokok-pokok kebijakan.
 5. Pengertian.
 - a. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun.
 - b. Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan-tindakan dimasa yang akan datang secara tepat melalui sistematika atau urutan

pilihan yang benar dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

- c. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- d. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
- e. Pertahanan militer adalah bertumpu kepada TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer.
- f. Pertahanan nirmiliter adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman nirmiliter.
- g. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
- h. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) adalah jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah K/L untuk periode 5 tahun.
- i. Kebijakan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan atau pengembangan program dalam mencapai tujuan yang telah dicapai.
- j. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/Lembaga.
- k. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

1. Pagu indikatif merupakan ancar-ancur pagu anggaran yang diberikan kepada K/L untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renja K/L.

BAB II

LANDASAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PERTAHANAN NEGARA

6. Landasan Idiil. Pancasila merupakan dasar, falsafah dan ideologi negara yang berisi nilai-nilai moral dan etika yang telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa serta bernegara dan berdaya saing. Untuk itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
7. Landasan Yuridis. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur tentang penyelenggaraan pertahanan negara, pengelolaan sistem pertahanan negara dan pembinaan kemampuan pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal bangsa dan negara, yang direalisasikan melalui sistem pertahanan negara.
8. Landasan Visional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh.
9. Landasan Konseptual. Ketahanan Nasional merupakan geostrategi Indonesia sebagai implementasi dari konsep geopolitik wawasan nusantara, dalam mewujudkan daya tangkal nasional serta mempengaruhi ketahanan regional dan supra regional.

BAB III

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

10. Umum.

- a. Dinamika dan kecenderungan (tren) lingkungan strategis internasional senantiasa berpengaruh terhadap perkembangan pada tataran nasional, tidak terkecuali terhadap proses penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara yang secara mendasar menentukan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kepentingan nasional di bidang pertahanan. Dalam konteks ini, antisipasi terhadap setiap implikasi negatif maupun optimalisasi atas implikasi positif dari dinamika lingkungan strategis menjadi salah satu faktor krusial yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan perencanaan pertahanan negara, selain faktor internal menyangkut dinamika pada tataran nasional seperti situasi politik, kemampuan dukungan anggaran negara dan alokasi sumber daya yang terkait lainnya.
- b. Sangat disadari bahwa dinamika dan kecenderungan lingkungan strategis pada saat ini, sangat jauh berbeda dibandingkan periode satu dekade terakhir pada abad 20. Pada era globalisasi di berbagai bidang kehidupan yang membawa tuntutan kepada negara-negara di dunia untuk saling bekerjasama, persaingan antarnegara dalam melindungi kepentingan nasional juga tetap dominan. Interdependensi antarnegara semakin menguat, tetapi pada saat yang bersamaan kesenjangan *power* ekonomi dan militer tetap semakin melebar karena isu dan tren internasional masih dominan dipengaruhi oleh agenda dan kebijakan negara-negara maju. Secara umum, kompleksitas, ketidakteraturan dan ketidakstabilan merupakan corak dominan dalam lingkungan strategis internasional saat ini, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi upaya-upaya setiap negara, dengan kapasitas nasional masing-masing, untuk menjamin keamanan nasional, terutama kepentingan pertahanan negara sama sekali tidak berada dalam ancaman apapun. Meskipun diprediksi akan menghadapi ancaman, kapasitas negara untuk menghadapinya sudah sejak awal dipersiapkan untuk mengantisipasi sekaligus mengatasi berbagai bentuk ancaman yang potensial.
- c. Dalam kondisi tuntutan seperti demikian, negara-negara berkembang yang memiliki sumberdaya terbatas ataupun memiliki keterbatasan

kemampuan pengelolaan sumberdaya terkait, harus lebih hati-hati dan secara bijaksana mengatasi permasalahan yang dihadapi, lebih aktif memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang, dan lebih baik dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam melindungi kepentingan-kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak dapat dipungkiri menghadapi sejumlah keterbatasan di bidang pertahanan, harus mampu memaknai setiap peluang, tantangan, maupun ancaman yang dihadapi bangsa dan negara demi kepentingan pertahanan negara.

11. Lingkungan Strategis Global.

- a. Pemulihan ekonomi pasca krisis global. Perekonomian dunia pasca krisis global terburuk dalam 70 tahun terakhir, mulai menunjukkan perkembangan positif pada Tahun 2009. Setelah mengalami pertumbuhan minim pada Tahun 2008, perekonomian global mulai membaik dengan angka pertumbuhan sekitar 1,1 persen. Sejumlah kawasan dan negara yang menderita pertumbuhan negatif juga mulai merasakan pemulihan perekonomian. Jepang, Perancis, Jerman dan AS yang terkena dampak sangat besar telah mengalami pertumbuhan positif, yang menjadikan hal ini sebagai salah satu signal bagi stabilitas perekonomian global. Akan tetapi, sektor keuangan terutama sektor kredit yang belum pulih sepenuhnya, akan menyebabkan pemulihan ekonomi masih berlangsung relatif lambat, yang ditandai dengan masih cukup tingginya pengangguran dan rendahnya kemampuan keuangan masyarakat di berbagai belahan dunia. Meski periode tersulit dalam krisis global diprediksi telah berakhir, namun nampak krisis perekonomian global masih akan dirasakan sebagian besar negara di berbagai kawasan setidaknya-tidaknya hingga satu dekade ke depan.
- b. Keterbatasan energi dan pangan. Pertambahan populasi penduduk dunia, laju roda pembangunan, serta belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi untuk kepentingan pembangunan, menyebabkan minyak dan gas bumi, semakin terbatas dan tetap menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan. Akibatnya, fluktuasi harga minyak yang drastis menjadi sulit untuk dihindarkan. Kondisi demikian berpengaruh terhadap dinamika ekonomi, politik dan keamanan internasional sebagai akibat masih tingginya ketergantungan pada kedua sumber daya energi tersebut. Selain itu, pertambahan populasi penduduk juga mempengaruhi terjadinya kenaikan harga komoditas pangan dunia, yang secara langsung mempengaruhi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok

di negara-negara berkembang. Kondisi yang dapat memicu gejolak sosial dan politik ini diprediksi akan terus dihadapi berbagai negara di dunia, tidak hanya negara-negara berkembang melainkan juga negara-negara maju.

- c. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang dampaknya telah dirasakan oleh seluruh negara di dunia menjadi agenda internasional yang terus menerus diupayakan penanganannya. Kesadaran dan komitmen tentang pentingnya mitigasi dampak perubahan iklim telah mengakar kuat, akan tetapi langkah-langkah global yang efektif dan konkrit tetap belum disepakati karena masih adanya perbedaan pandangan sekaligus kesediaan untuk *common but differentiated responsibilities* antara negara maju dan berkembang. Dalam kondisi demikian, dunia berpotensi menghadapi sejumlah dampak dari fenomena tersebut, mulai dari naiknya permukaan laut, cuaca ekstrim, penyakit baru, degradasi sumber daya alam, hingga masalah-masalah sosial, lingkungan hidup, kesehatan (flu burung, flu babi, dan lainnya), dan bahkan menghadapi ancaman fisik kedaulatan.
- d. Dominasi negara-negara maju. Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara *major powers* dalam mengamankan kepentingan nasionalnya. Pendekatan baru AS di bawah pemerintahan Barack Obama membawa atmosfer positif terhadap dinamika politik dan keamanan internasional. Namun demikian, dinamika politik dan keamanan internasional, masih bergantung pada keseriusan AS dan negara-negara besar lain dalam mengurangi *adventurisme* politik luar negeri yang mendorong instabilitas dan gejolak di berbagai kawasan, serta mendorong reformasi dan restrukturisasi DK PBB yang memiliki tanggung jawab dan peran legal secara global untuk memelihara perdamaian dan stabilitas internasional. Dominasi negara-negara maju dalam hal penguasaan teknologi, termasuk teknologi militer, diprediksi masih akan bertahan, meskipun sejumlah negara seperti India dan China mulai menunjukkan kemampuan untuk bersaing. Ditengah-tengah tren seperti ini, agenda dan isu global akan tetap banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara maju dalam mempertahankan kondisi *status quo* yang menguntungkan bagi kepentingannya. Namun demikian, dalam dua dekade ke depan China akan menjadi satu kekuatan global, yang akan semakin mendinamisasi perkembangan ekonomi, politik dan keamanan internasional.

- e. Konflik *inter-state* dan *intra-state*. Dalam era interdependensi antarnegara saat ini, perang merupakan peristiwa yang sangat dihindari karena disadari tidak lebih menguntungkan dibandingkan mengedepankan jalur diplomasi. Diutamakannya pendekatan *smart power* juga mendorong terbentuknya atmosfer politik dan keamanan internasional yang lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, konflik antarnegara dan konflik di dalam suatu negara masih potensial. Meski tren konflik bersenjata dalam abad 21 menunjukkan penurunan, akan tetapi titik api konflik (*flashpoint*) tetap banyak dan menyebar diberbagai kawasan dunia. Konflik antarnegara yang berlatarbelakang klaim wilayah, pelanggaran wilayah, spionase, hingga ancaman keamanan nasional dari keberadaan senjata pemusnah massal, isu kejahatan lintas negara, masalah keamanan jalur maritim dan dirgantara, serta perebutan sumber daya masih cukup potensial. Sedangkan konflik domestik yang potensial mencakup separatisme, terorisme, konflik komunal, kudeta, perang saudara dan lainnya. Secara khusus, terorisme diprediksi tetap menjadi fokus strategi keamanan pada tataran global seiring dengan belum teratasinya akar-akar penyebab dan pemicunya, termasuk belum jelasnya perkembangan di kawasan Timur Tengah yang kerap kali memicu sentimen terorisme yakni terkait konflik Israel-Palestina, serta perkembangan di Afghanistan dan Irak.

12. Lingkungan Strategis Regional.

- a. Kawasan Amerika. Dinamika politik dan keamanan di kawasan Amerika akan tetap dipengaruhi oleh kebijakan AS sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia (*sole superpower*). Di kawasan ini, AS relatif belum mendapat saingan dalam hal ekonomi, politik, teknologi dan keamanan/militer, termasuk dari Brasil yang banyak dipandang berbagai kalangan sebagai *regional players* di kawasan, maupun dari kelompok negara-negara kiri yang berupaya mengurangi pengaruh AS di kawasan Amerika Latin, seperti Venezuela. Meski demikian, seiring dengan tren bertambahnya pemerintahan kiri di Amerika Latin, pengaruh dan sekutu AS di kawasan secara perlahan berkurang.

Pemerintahan AS dibawah kepemimpinan Presiden Obama telah membawa angin segar terhadap dinamika politik dan keamanan di kawasan, terutama dengan mencoba memposisikan diri sejajar dengan negara-negara tetangganya. Pendekatan tersebut, yang diiringi dengan sikap lebih menghormati dan menghargai kepentingan negara-negara di

kawasan, membawa berbagai kemajuan positif terhadap intensitas kerjasama regional. Namun demikian dipihak lain, semakin menguatnya hubungan kerjasama pertahanan antara Venezuela dengan Rusia, dapat mempengaruhi intensitas persaingan pengaruh antara AS dan lawannya, termasuk mempengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan tersebut.

- b. Kawasan Eropa. Peran dan pengaruh Rusia dalam dinamika ekonomi, politik dan keamanan di kawasan terus meningkat. Ketergantungan negara-negara Eropa terhadap pasokan gas Rusia telah memberi negara tersebut *leverage* politik dan modal adventurisme kebijakan politik luar negeri dan pertahanan. Tindakan unilateral di Georgia, penarikan diri dari *Treaty of Conventional Forces in Europe/CFE*, pengakuan secara sepihak atas kemerdekaan Abhazia dan Osetia Selatan, hingga ancaman balik berupa penggelaran rudal di Kalingrad, tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu pertimbangan AS dalam membatalkan pembangunan pertahanan rudal Eropa. Dalam jangka panjang, peran dan pengaruh Rusia di kawasan akan terus menguat, termasuk menyangkut *bargaining position* terhadap UE dan NATO.
- c. Kawasan Afrika. Perkembangan di kawasan Afrika masih dominan diwarnai oleh permasalahan keamanan, seperti kudeta, perang saudara, konflik bersenjata, serta banyak diwarnai dengan masalah krisis pangan, penegakan demokrasi dan HAM. Kecenderungan hadirnya kekerasan dalam politik di Afrika masih cukup kuat, seperti yang terjadi di Kongo dan Somalia, sehingga rawan terjadi gejolak-gejolak politik dan keamanan yang mengganggu stabilitas kawasan. Ketidakefektifan pemerintahan sebenarnya tidak hanya terjadi di Somalia, melainkan sejumlah negara lain, sehingga potensi gangguan keamanan kedepan masih cukup tinggi. Dalam kondisi demikian, Afrika tetap diprediksi sangat potensial diwarnai konflik, baik *inter-state* maupun *intra-state*, yang membutuhkan penggelaran misi perdamaian PBB di kawasan tersebut.
- d. Asia.
 - 1) Sub Kawasan Asia Tenggara.
 - a) Dinamika domestik. Dinamika politik domestik negara-negara di kawasan secara umum stabil dan jarang mempengaruhi dinamika regional. Namun demikian, konflik domestik tetap mengemuka seperti halnya dalam kasus Thailand, Filipina, Myanmar, dan lainnya. Dari sisi keamanan domestik,

terorisme, separatisme dan konflik horizontal bersenjata, mendominasi persoalan keamanan di negara-negara kawasan, misalnya di Filipina, Thailand, dan Indonesia.

- b) Konflik antarnegara. Konflik wilayah perbatasan antara Kamboja dan Thailand yang sempat berujung pada benturan antara angkatan bersenjata kedua negara, merupakan satu-satunya kasus konflik antarnegara di kawasan Asia Tenggara sejak beberapa tahun terakhir. Meski demikian, potensi konflik antarnegara sesungguhnya masih cukup potensial, seperti kasus antara Indonesia-Malaysia. Menguatnya pendekatan diplomasi baik secara bilateral, maupun multilateral melalui ASEAN ataupun sejumlah kerangka kerjasama keamanan lainnya, mendorong terbentuknya atmosfer hubungan antarnegara yang lebih kondusif dan stabil.
 - c) Isu keamanan lintas negara. Berbagai aksi kejahatan lintas negara, seperti *illegal logging*, *illegal fishing*, *human trafficking*, *smuggling* masih kerap kali terjadi di kawasan yang sifatnya melampaui batas negara, baik di darat maupun laut. Masalah pengungsi yang melintasi wilayah perairan di kawasan Asia Tenggara, juga tetap kerap kali mengemuka. Isu keamanan lain yang menonjol adalah terkait jaringan teroris yang beraktivitas di sejumlah negara. Sebagai kawasan yang rawan mengalami bencana alam, kerjasama penanganan bencana semakin menguat baik secara bilateral maupun multilateral dalam kerangka ASEAN.
 - d) Modernisasi persenjataan. Modernisasi persenjataan di kawasan Asia Tenggara, yang sempat terhenti akibat krisis ekonomi Tahun 1997, kembali menguat. Meski dampak krisis ekonomi global Tahun 2007 masih membatasi kinerja perekonomian negara-negara di kawasan, modernisasi persenjataan khususnya dalam pengembangan dan penguatan kekuatan laut dan udara, mulai meningkat kembali. Secara khusus, Malaysia dan Singapura merupakan dua negara yang telah memperkuat kekuatan militernya secara signifikan dalam dua tahun terakhir.
- 2) Sub Kawasan Asia Timur.
- a) Ketegangan di Semenanjung Korea. Kondisi politik dan keamanan di Semenanjung Korea semakin panas dengan

pernyataan Korut yang siap melakukan konfrontasi dengan Korsel, sebagai reaksi atas kebijakan keras Korsel terhadap program pengayaan uranium Korut. Ketegangan semakin meningkat setelah kasus saling tembak antara Angkatan Laut kedua negara, yang hingga kini masih diupayakan untuk diredakan baik oleh kedua negara maupun melalui mediasi pihak luar. Hingga kini penanganan program nuklir Korut dan penyelesaian konflik antara Korut dan Korsel senantiasa mengalami pasang surut.

- b) Pertumbuhan ekonomi dan modernisasi militer China. Modernisasi kekuatan militer yang telah dimulai China sejak satu dekade terakhir, kembali digiatkan setelah perekonomiannya mulai menunjukkan kemajuan positif pasca krisis ekonomi global. Meski politik luar negeri China terhadap Jepang, Korsel dan Taiwan mulai melunak, langkah pembangunan kekuatan militer tetap secara konsisten dilaksanakan. Dengan konsistensi pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 10 persen pertahun, China telah berhasil menggeser posisi negara-negara maju. China telah menggeser Jerman sebagai eksportir terbesar dunia, dan diprediksi akan menggeser Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, setelah AS. Dan pada Tahun 2030, China diprediksi akan menjadi produsen sekaligus pasar terbesar dunia, mengalahkan seluruh negara maju. Dengan dukungan perekonomian yang kuat, pembangunan kekuatan militer China juga akan mampu melampaui kekuatan militer negara-negara maju, termasuk Korea dan Jepang yang mendapat payung keamanan dari AS.
- 3) Sub Kawasan Asia Selatan.
 - a) Persaingan India-Pakistan. Hubungan India-Pakistan pada Tahun 2009 relatif tidak banyak bergejolak. Ketegangan hubungan kedua negara pasca peledakan bom di Mumbai Tahun 2008, memperlihatkan perkembangan positif dengan dijalinnya kerja sama untuk mengungkap kasus tersebut, bersama-sama dengan sejumlah negara Barat. Namun demikian permusuhan tradisional antara kedua negara khususnya menyangkut masalah Khasmir tetap belum tersentuh hingga saat ini, sehingga ketegangan antara India dan Pakistan, masih

potensial kembali terjadi. Kedekatan hubungan dengan AS menjadi salah satu faktor yang semakin menguat pengaruhnya terhadap dinamika persaingan kedua negara dalam memperluas pengaruh di kawasan. Isu kerja sama nuklir India-AS, maupun kerja sama Pakistan-AS dalam mengatasi Taliban dan kelompok Al Qaeda di perbatasan, merupakan bentuk persaingan dalam mendapat perhatian lebih dari AS.

- b) Kelompok garis keras di Pakistan. Gencarnya operasi militer AS di Afghanistan menyebabkan kelompok Taliban dan pendukungnya semakin terdesak dan menjadikan wilayah perbatasan Pakistan-Afghanistan sebagai lokasi persembunyian. Tanpa bantuan tentara Pakistan, operasi militer AS-NATO-Afghanistan terhadap Taliban dan kelompok Al Qaeda, tidak akan banyak membuahkan hasil. Untuk itu pada Tahun 2009 sangat terlihat upaya AS mendekati kembali Pakistan, yang seolah-olah sempat ditinggalkan ketika India dipandang strategis untuk menangkal perluasan pengaruh China di kawasan Asia Pasifik. Pendekatan ini diprediksi akan terus berlanjut, setidaknya hingga ada kemajuan di Afghanistan.

4) Sub Kawasan Asia Barat.

- a) Penyelesaian konflik Israel-Palestina. Upaya perdamaian konflik Israel-Palestina yang gencar disuarakan oleh pemerintahan Obama, belum memperlihatkan kemajuan. Tanpa kejelasan tentang gagasan solusi dua negara (*two-state solution*) ataupun terkait dengan tuntutan penghentian pembangunan pemukiman oleh Israel yang menjadi isu vital bagi kedua belah pihak yang berkonflik, upaya perdamaian ini dapat berakhir pada kegagalan seperti masa-masa sebelumnya.
- b) Program nuklir Iran. Perkembangan program nuklir Iran terus menjadi sorotan dunia internasional. Sikap keras Presiden Ahmadinejad terlihat mulai melunak, akan tetapi pemimpin Iran tersebut tetap belum mau mundur dari posisi agar Iran memiliki kemampuan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Tanpa adanya kemajuan signifikan dari sikap Iran, tekanan dari negara-negara Barat, termasuk Rusia, tidak dapat dihindari mengingat dalam perkembangan terakhir hubungan Rusia dan AS semakin positif.

- 5) Sub Kawasan Australia dan Pasifik. Secara umum perkembangan kawasan Australia dan Pasifik relatif kondusif. Kemenangan Partai Buruh Australia, dibawah kepemimpinan Kevin Rudd, telah menimbulkan harapan baru bagi hubungan baik Australia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk dengan Indonesia. Namun demikian, kebijakan Australia pada dasarnya akan selalu bergantung pada kepentingan nasional dan hubungannya dengan AS, sehingga riak-riak dalam hubungan dengan tetangga dipastikan akan mengalami pasang surut. Disisi lain, pengaruh Australia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik sangat besar, selain peran dan pengaruhnya di Timor Leste. Dengan pengaruhnya ini, Australia telah memposisikan sebagai pemimpin regional tetap sangat diperhitungkan. Dengan peran strategis ini, maka arah perkembangan dan kebijakan negara-negara di kawasan Pasifik akan sangat dipengaruhi kebijakan luar negeri Australia.

13. Lingkungan Strategis Nasional.

a. Ideologi dan politik.

- 1) Penurunan pemahaman dan kesadaran Pancasila. Selama satu dekade terakhir, perkembangan dalam bidang ideologi yang cukup memprihatinkan adalah penurunan pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila. Masih kuatnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit (*ethno-nationalism*) memperlihatkan indikasi kurangnya atau bahkan penurunan pemahaman tentang ideologi negara. Selain itu, dari aktivitas kelompok-kelompok radikal juga memperlihatkan adanya penggerosan nilai-nilai Pancasila, baik secara terbuka maupun tertutup, yang secara perlahan memperlemah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Penguatan *civil society*. Penguatan kekuatan dan jaringan *civil society*, terutama LSM, pasca reformasi merupakan suatu fenomena positif yang mendorong sikap proaktif berbagai elemen masyarakat untuk mengawasi kelangsungan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kritik dan kontrol dari kelompok ini, tidak hanya menyangkut kebijakan ekonomi dan politik, melainkan juga dalam kebijakan keamanan dan pertahanan, sehingga dari perspektif demokrasi merupakan pertanda kemajuan *social empowerment* yang menekankan kesadaran masyarakat akan hak-haknya.

Kekuatan dan jaringan sosial ini pada hakikatnya dapat menjadi perantara (*mediating structure*) yang membantu menjamin penggunaan kekuasaan negara berada dalam koridor hukum. Yang patut dicermati, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus di tanah air, adalah adanya upaya menarik *civil society* kedalam ruang persaingan politik kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah, dan potensi intervensi negara/LSM asing sebagai penyumbang dana yang mempengaruhi agenda sejumlah LSM di tanah air.

b. Ekonomi.

- 1) Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode pemulihan perekonomian global masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Sepanjang Tahun 2009, yang diperkirakan merupakan periode tersulit bagi perekonomian negara-negara di dunia, perekonomian nasional masih tumbuh sekitar 4,4 persen. Performa ekonomi tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2010, yang diperkirakan dapat tumbuh sekitar 6 persen. Angka ini masih mengungguli negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina dan Thailand yang diproyeksikan hanya tumbuh sekitar 4,5-5,5 persen. Untuk Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi nasional dapat tumbuh lebih dari proyeksi Tahun 2010, apabila pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan di sektor investasi, perdagangan internasional, atau sektor lain diluar faktor populasi.
- 2) Pendapatan nasional. Pendapatan nasional Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2010, pertumbuhan PDB diproyeksikan akan mencapai 5,5 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,3 persen, karena masa krisis dianggap telah berakhir dan ekonomi global sudah mulai tumbuh. Pada Tahun 2011, pertumbuhan PDB diproyeksikan juga meningkat, seiring dengan membaiknya realisasi penerimaan pajak dan nilai ekspor. Dalam kondisi demikian, pemerintah memiliki keleluasaan untuk menaikkan anggaran pertahanan seperti tahun anggaran Tahun 2010. Namun, kemungkinan gangguan terhadap kinerja perekonomian nasional tetap terbuka, terutama dari faktor luar negeri.

c. Perkembangan sosial budaya.

- 1) Toleransi beragama. Toleransi antarumat beragama memang mengalami perbaikan setelah sempat terganggu akibat isu

terorisme, akan tetapi politisasi dan fanatisme agama tampaknya cenderung masih akan terjadi. Terlebih, dengan mengemukanya kembali isu ideologi Pancasila versus Islam dalam beberapa tahun terakhir, kohesifitas dan toleransi beragama masih berada dalam tekanan. Hal ini berimplikasi pada kerawanan politisasi isu-isu agama yang mudah sekali memancing ketegangan dan perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

- 2) Interaksi sosial. Tekanan sosial ekonomi dan ketidakpastian hukum merupakan beberapa faktor penyebab perubahan perilaku masyarakat yang lebih mementingkan kelompok. Perilaku atau sikap mau menang sendiri, intoleran yang tidak menghargai pluralisme dan solidaritas kelompok dalam perkembangannya cenderung semakin meningkat. Tindak kekerasan, main hakim sendiri dan tindakan anarki yang tidak mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat dan hukum telah mewarnai kehidupan sehari-hari di sebagian masyarakat. Perilaku masyarakat tersebut dapat dilihat, seperti dalam kasus perkelahian antarkampung, tindak kekerasan massa, sikap-sikap main hakim sendiri, hingga serangan terhadap aparat/kantor kepolisian dan tentara.

d. Perkembangan pertahanan dan keamanan.

- 1) Radikalisme dan terorisme. Upaya pemerintah untuk memberantas terorisme telah mengalami banyak kemajuan. Pemberantasan teroris memang meraih berbagai keberhasilan, baik dari segi pengungkapan kasus teror maupun deteksi dini dalam rangka mengungkap jaringan teroris dan mencegah aksi teror terjadi kembali. Namun demikian, tidak demikian halnya dalam pemberantasan radikalisme sebagai faktor yang mempengaruhi dinamika terorisme di tanah air. Dalam konteks pencegahan, terpadunya program deradikalisasi masih harus ditingkatkan dalam mendorong keberhasilan pemberantasan terorisme di Indonesia.
- 2) Kejahatan lintas negara. Dalam satu dekade terakhir, diperkirakan tindak kejahatan, seperti *smuggling*, *illegal logging*, *illegal fishing*, *human and drugs trafficking*, semakin marak terjadi sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Dari aksi *illegal logging* saja, diperkirakan kerugian materiil mencapai Rp. 562 triliun, yang menjadikan tindak kejahatan ini sebagai sumber penghilang devisa negara, dan sumber kerusakan hutan di Indonesia. Jumlah kerugian ini belum termasuk tindakan kejahatan

lintas negara lainnya. Maraknya tindak kejahatan ini, memperlihatkan masih lemahnya pengamanan wilayah negara, terutama di daerah perbatasan darat dan maritim tersebut, sehingga memudahkan jaringan kelompok tersebut memasukkan barang-barang ilegal masuk dan keluar Indonesia.

- 3) Perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Masih adanya sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat dan maritim yang hingga kini belum selesai menjadikan isu ini menjadi sumber potensi konflik dengan negara tetangga. Peningkatan pengawasan dan pengamanan sangat diperlukan, seiring dengan upaya pendayagunaan wilayah-wilayah agar bermanfaat bagi masyarakat setempat. Seiring dengan langkah tersebut, diperlukan perhatian terhadap masalah manajemen pengawasan dan pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, yang terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh instansi yang terkait. Penanganan yang parsial dan kebijakan tumpang tindih menyebabkan pembangunan/ pemberdayaan wilayah dan masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar senantiasa lamban.

Bencana alam. Sebagai negara yang berada di atas tiga lempeng bumi yang sangat aktif, Indonesia akan selalu rawan menghadapi bencana gempa bumi, dan tsunami, sehingga evaluasi dan perbaikan terhadap manajemen penanggulangan bencana sangat dibutuhkan. Gempa, tsunami, banjir dan tanah longsor merupakan peristiwa bencana yang hampir selalu hadir dalam satu dekade terakhir, seperti di Aceh, Kalimantan, Yogyakarta, Padang, dan berbagai daerah lainnya. Seiring dengan menguatnya fenomena alam yang disebabkan pemanasan global, kasus-kasus bencana di Indonesia akan semakin beragam, tidak hanya bencana alam melainkan juga bencana akibat tindakan manusia.

- 4) Pembangunan komponen cadangan dan pendukung. Hingga saat ini, mewujudkan sistem pertahanan semesta belum terlaksana, dengan belum terbentuknya kekuatan pertahanan yang nyata dari komponen cadangan dan komponen pendukung. Merealisasikan hak dan kewajiban warga negara dalam RUU kedua komponen tersebut masih menjadi polemik dan isu kontroversial di tanah air. Mengingat polemik yang muncul lebih terkait aspek pengaturan, sedangkan arti pentingnya pembentukan kedua komponen

pertahanan ini relatif disepakati bersama, maka langkah maju untuk segera mewujudkan sistem pertahanan semesta masih terbuka lebar.

- 5) Revitalisasi industri pertahanan. Kemajuan dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan mengalami kendala akibat krisis ekonomi Tahun 1997. Krisis ekonomi global juga tidak dapat dihindari telah menambah kendala bagi pemerintah maupun pihak perusahaan untuk mewujudkan hal tersebut. Selain hambatan dari anggaran pertahanan, mewujudkan industri pertahanan yang mandiri masih terkendala dari faktor sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan kemampuan pengembangan dan riset. Akibatnya, hingga saat ini kiprah industri pertahanan nasional masih mengalami pasang surut dan relatif belum mampu memproduksi produk berteknologi tinggi. Seiring dengan komitmen dukungan pemerintah berupa pendanaan dan jaminan pengadaan dari industri pertahanan nasional secara berkelanjutan dan terencana, maka upaya merevitalisasi industri pertahanan untuk menuju kemandirian semakin terbuka. Akan tetapi, dalam prosesnya diprediksi masih diperlukan kerja sama dengan negara atau industri pertahanan luar negeri untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional.

e. Perkembangan daerah konflik.

- 1) Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak MoU Helsinki ditandatangani, dinamika politik dan keamanan di Provinsi NAD secara umum berkembang cukup dinamis. Masyarakat Aceh kini telah menikmati perdamaian dan roda kehidupan yang selama konflik sangat terbatas kini telah bergerak normal. Namun demikian, perkembangan politik Aceh saat ini sangat perlu dicermati, seiring dengan penguasaan mayoritas lembaga eksekutif dan legislatif oleh partai lokal yang belum jelas diketahui kepentingan dan tujuan akhir dari perjuangan politiknya. Pada permukaan, situasi keamanan Aceh memang terlihat sangat kondusif, namun di lapangan ternyata masih terdapat sejumlah aktivitas kelompok tertentu yang tidak menginginkan suasana damai di Aceh.

Masih adanya sejumlah permasalahan dalam kerangka penanganan konflik yang belum dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pengesahan sejumlah peraturan perundangan, pembentukan pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), akan dapat menjadi batu ganjalan dalam menyelesaikan konflik

Aceh. Walaupun telah banyak kemajuan dalam program reintegrasi masyarakat, penanganan korban bencana alam dan konflik, masalah-masalah ini dapat mengganggu proses penciptaan perdamaian permanen di Aceh.

- 2) Papua. Serupa dengan konflik di Aceh, penanganan gerakan separatisme di Papua juga banyak menunjukkan kemajuan. Seiring dengan langkah penerapan otonomi khusus, berbagai keberhasilan dalam bidang ekonomi dan pembangunan telah dicapai. Dari segi keamanan, aktivitas perjuangan bersenjata OPM juga cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, serangan bersenjata pada selama Tahun 2009 memperlihatkan bahwa kekuatan kelompok separatis tidak boleh dikesampingkan. Meskipun, aparat keamanan berhasil mengatasi salah satu tokoh OPM Kelly Kwalik, kelompok OPM lainnya masih beroperasi. Dukungan sejumlah negara dan tokoh politik asing, termasuk kegiatan sejumlah LSM di Papua masih cukup sulit untuk dipantau seluruhnya, sehingga pembangunan dan stabilitas keamanan di Papua yang berhasil dicapai saat ini, masih dapat terganggu oleh sejumlah masalah atau isu, termasuk isu pemekaran wilayah yang dipandang berbeda-beda oleh berbagai kalangan.

Meningkatnya jumlah masyarakat Papua di Papua Nugini yang menginginkan kembali ke Indonesia dan meningkatnya jumlah anggota OPM yang telah menyerahkan dan menyatakan diri bergabung kembali dengan Indonesia, menunjukkan bahwa dampak penerapan otonomi khusus telah mulai terlihat hasilnya. Walaupun tidak diakui oleh sejumlah kalangan, hal ini menunjukkan perubahan pendekatan dan keseriusan pemerintah telah diketahui dan diakui oleh pihak-pihak di luar wilayah Indonesia.

14. Ancaman. Dari perkembangan dan kecenderungan lingkungan strategis, maka prediksi ancaman yang kemungkinan muncul adalah :
 - a. Ideologi. Maraknya KKN, anarkisme, radikalisme, primordialisme sempit merupakan indikasi menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai ideologi negara. Tergerusnya nilai-nilai tersebut merupakan ancaman nyata yang dihadapi Indonesia ke depan. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan langkah nyata dari segenap elemen bangsa untuk menempatkan kembali Pancasila sesuai proporsinya, agar bangsa Indonesia akan memiliki landasan yang kuat dalam menghadapi ancaman dan tantangan pada

Tahun 2011 dan berikutnya. Butuh waktu, pengorbanan dan tindakan berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

- b. Politik. Pengaruh global tetap mewarnai dinamika politik nasional, baik karena pesatnya perkembangan teknologi informasi maupun adanya unsur kepentingan. Namun demikian seiring dengan perkembangan demokrasi yang ditandai dengan tumbuhnya partai lokal dan nasional serta pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang berlangsung damai, masyarakat masih belum mempercayai partai politik untuk menyalurkan aspirasinya. Hal ini terkait dengan partai politik yang cenderung bersikap pragmatis mementingkan partai dan anggotanya dengan mengabaikan kepentingan konstitusinya. Sikap pragmatis yang lebih mementingkan diri dan golongannya juga tercermin dalam beberapa kasus korupsi, kasus Bank Century, pilkada, dan pemekaran daerah. Permasalahan ini akan tetap mewarnai Tahun 2011. Proses pendewasaan berpolitik merupakan konsekuensi logis yang harus ditempuh khususnya oleh organisasi politik dan anggotanya agar lebih menarik konstitusinya. Penanganan korupsi yang cukup intens merupakan langkah positif dalam menunjang keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dapat berimbas pada pelaksanaan otonomi daerah secara benar.
- c. Ekonomi. Implikasi krisis finansial dan gejolak perekonomian global, seperti fluktuasi nilai tukar uang dan harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nasional. Ancaman lainnya masuknya barang-barang murah dan ilegal dari negara-negara luar. Secara internalpun Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan produk yang kurang kompetitif, rumitnya birokrasi, jaminan hukum dan keamanan, aksi-aksi unjuk rasa buruh hingga pemadaman listrik bergilir. Potensi ancaman pada Tahun 2011 juga tidak jauh berbeda dengan Tahun 2010. Kemampuan pemerintah untuk merespon berbagai tantangan di atas, akan berdampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.
- d. Sosial budaya. Berbagai permasalahan kesehatan masyarakat (flu burung, HIV/AIDS, dan demam berdarah), kesejahteraan masyarakat (pengangguran dan kemiskinan). Ditengah-tengah kesulitan mendapatkan akses ke sumber-sumber ekonomi, tekanan hidup yang berat berpotensi menimbulkan gejolak sosial dalam wujud aksi unjuk rasa hingga tindakan-tindakan anarkis dan destruktif yang menjurus kerusuhan sosial. Berbagai permasalahan seperti di atas akan tetap

dihadapi pada Tahun 2011 intensitas tidak jauh berbeda. Kompleksitas permasalahan sosial setiap saat cenderung meningkat seiring dengan naiknya kebutuhan dan beban hidup akibat perubahan di berbagai aspek kehidupan. Seberapa jauh dapat mengurai permasalahan tersebut akan mewarnai kebijakan pemerintah ke depan.

e. Pertahanan keamanan.

- 1) Permasalahan perbatasan dengan negara tetangga masih banyak yang belum terselesaikan, sehingga berpotensi memicu terjadinya konflik terbatas. Ancaman lainnya karena adanya pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara di wilayah perbatasan darat dan laut. Selain permasalahan perbatasan, pengamanan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, tetap menjadi kerawanan yang harus diantisipasi.
- 2) Aktivitas kelompok separatis di Papua, Maluku, yang secara aktif terus memperjuangkan ide kemerdekaannya. Demikian pula dengan masih adanya potensi kegiatan yang mengarah separatisme di Provinsi NAD. Dalam kaitan dengan separatisme Aceh, agenda pemerintah daerah pasca Pemilu 2009, baik eksekutif maupun legislatif, akan menjadi titik krusial bagi perkembangan Provinsi NAD.
- 3) Aktivitas kelompok teroris yang menargetkan fasilitas-fasilitas publik dan instalasi-instalasi nasional, serta objek kepentingan negara-negara asing. Dampak krisis global yang berakibat pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak menutup kemungkinan akan dimanfaatkan kelompok teroris untuk merekrut anggota baru. Krisis yang bersumber dari AS itu akan dijadikan kambing hitam untuk lebih menimbulkan sentimen kebencian anti-AS.
- 4) Konflik kepentingan antarkelompok berlatar belakang SARA dan tanah yang berpotensi memicu terjadinya bentrokan antarkelompok, termasuk potensi konflik komunal di Poso dan Ambon. Ini berarti ancaman teror dan peledakan bom kemungkinan masih akan terus terjadi.
- 5) Aktivitas kelompok radikal dengan tindakan anarkis dan kekerasan terhadap kelompok lain tampaknya akan terus menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan. Pemiarian gerakan radikalisme ini berpotensi memicu perhatian dan tekanan komunitas internasional.

- 6) Aktivitas kejahatan transnasional *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal mining*, *human trafficking*, peredaran narkoba dan tindak kriminal terorganisir lainnya, seperti penyelundupan, perompakan dan pencucian uang (*money laundering*).
- 7) Bencana alam berupa gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Potensi ancaman semakin meningkat dengan adanya dampak perubahan iklim dan pemanasan global.

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PERENCANAAN

15. Sasaran Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2011. Berdasarkan sasaran dan permasalahan yang dihadapi bidang pertahanan dan keamanan, maka rumusan sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan adalah
 - a. Terwujudnya postur dan struktur Pertahanan sebesar 25 % dari Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar.
 - b. Terbangunnya pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat dan terbangunnya pos pertahanan baru di pulau terdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya.
 - c. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan.
 - d. Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut.
 - e. Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme.
 - f. Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman keamanan nasional.
 - g. Terlindunginya informasi negara. Terlaksananya perlindungan terhadap informasi rahasia negara dari kebocoran akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
 - h. Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional di bidang keamanan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu.

16. Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2011. Berdasarkan sasaran dan permasalahan yang dihadapi bidang pertahanan dan keamanan, maka arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan meliputi 11 (sebelas) dari 14 (empat belas) arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam kerangka pikir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Pertahanan Militer

- 1) Modernisasi Alutsista serta penggantian Alutsista yang umur teknisnya sudah tua dan membahayakan keselamatan prajurit.
- 2) Peningkatan profesionalisme SDM yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan.
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajurit TNI.
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian.
- 5) Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.
- 6) Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat.
- 7) Pemantapan sistem persandian pertahanan untuk mendukung Sistem Persandian Nasional (Sisdina).

b. Pertahanan Nirmiliter.

- 1) Percepatan pembentukan Komponen Cadangan dan Pendukung.
- 2) Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan *Blue Print, Grand Design* beserta *Road Map*, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya.
- 3) Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

17. Kegiatan Prioritas Pembangunan Pertahanan Negara. Sesuai Meneg PPN/Ka Bappenas dan Menkeu tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2011, terdapat prioritas pembangunan pertahanan sebanyak 4 prioritas dari 5 prioritas yang tercantum dalam Renstra Haneg Tahun 2010-2014, meliputi :

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan mencapai MEF dengan beberapa fokus prioritas yakni :
 - 1) Meningkatkan profesionalisme personel dengan program sebagai berikut :
 - a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Integratif.
 - b) Profesionalisme prajurit Integratif.
 - c) Peningkatan profesionalisme personel Matra Darat.
 - d) Peningkatan profesionalisme personel Matra Laut.
 - e) Peningkatan profesionalisme personel Matra Udara.
 - f) Penggunaan kekuatan pertahanan Integratif.
 - 2) Modernisasi Alutsista dengan program :
 - a) Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Integratif.
 - b) Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Darat
 - c) Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Laut.
 - d) Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Udara.
 - 3) Percepatan pembentukan komponen cadangan dan pendukung dengan program : potensi pertahanan.
 - 4) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) dengan program :
 - a) Dukungan manajemen sarana pertahanan.
 - b) Dukungan kesiapan Matra Laut.
 - c) Dukungan kesiapan Matra Udara.
- b. Fokus prioritas pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional, meliputi :
 - 1) Penelitian dan pengembangan Kemhan.
 - 2) Pengembangan teknologi dan industri pertahanan.
- c. Peningkatan rasa aman masyarakat dengan fokus prioritas yakni :
 - 1) Deradikalisasi penangkal terorisme dengan program :
 - a) Potensi pertahanan.
 - (1) Pembinaan kesadaran bela negara.
 - (2) Pembentukan dan pembinaan komponen cadangan.
 - (3) Penataan dan pembinaan komponen pendukung.

- b) Penggunaan kekuatan pertahanan Integratif.
 - (1) Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi
 - (2) Operasi pemberdayaan wilayah pertahanan
 - (3) Operasi intelijen strategis
 - (4) Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
 - c) Dukungan kesiapan Matra Darat.
 - Penyelenggaraan intelijen dan pengamanan Matra Darat.
 - d) Dukungan kesiapan Matra Laut.
 - Penyelenggaraan intelijen dan pengamanan Matra Laut.
 - e) Dukungan kesiapan Matra Udara.
 - Penyelenggaraan intelijen dan pengamanan Matra Udara.
- 2) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan program yakni : penggunaan kekuatan pertahanan Integratif.
- Operasi bantuan TNI menanggulangi terorisme.
- d. Modernisasi deteksi dini keamanan nasional, dengan fokus prioritas yakni : memperluas cakupan deteksi dini baik luar negeri maupun dalam negeri dengan program :
- 1) Strategi pertahanan.
 - 2) Penggunaan kekuatan pertahanan Integratif.
 - 3) Dukungan kesiapan Matra Darat.
 - 4) Dukungan kesiapan Matra Laut.
 - 5) Dukungan kesiapan Matra Udara.

18. Rencana Anggaran Tahun 2011

- a. Rencana kebutuhan anggaran aktual sebesar 1,8% s.d. 2,1% PDB ekivalen $1,8\% \times \text{Rp } 6.178.253,98 \text{ M} = \text{Rp } 111.208,57 \text{ M}$ s.d. $2,1\% \times \text{Rp } 6.178.253,98 \text{ M} = \text{Rp } 129.743,33 \text{ M}$ (berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : PER/24/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Postur Pertahanan Negara).
- b. Ketersediaan anggaran Tahun 2011 dalam pagu indikatif lima tahunan yang tercantum dalam Renstra Haneg Tahun 2010-2014 sebesar Rp 44.883,00 M ekivalen 0,68% PDB.

- c. Ketersediaan anggaran pertahanan negara tahun 2011 sebesar Rp 44.908,50 M (sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 0181/M.PPN/04/2010, SE-120/MK/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah/RKP Tahun 2011.
- d. Berdasarkan ketersediaan/alokasi pagu anggaran Tahun 2011, pemetaan per program terdiri atas program generik sebesar Rp. 25.994,61 M mencapai 57,88%, dan program teknis sebesar Rp. 18.799,17 M mencapai 42,12% dengan rincian :

- 1) UO Kemhan 10 program : 4 program generik dan 6 program teknis dan 65 kegiatan.

a) Program generik	Rp.	921,16 M
(1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya UO. Kemhan	Rp.	806,44 M
(2) pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan	Rp.	13,89 M
(3) Penelitian dan pengembangan Kemhan	Rp.	19,83 M
(4) Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemhan/TNI	Rp.	81,00 M
b) Program teknis :	Rp.	2.127,09 M
(1) Strategi pertahanan	Rp.	38,91 M
(2) Perencanaan umum dan penganggaran Han	Rp.	358,28 M
(3) Manajemen pembangunan Sarpras	Rp.	156,41 M
(4) Teknologi dan industri pertahanan	Rp.	1.500,00 M
(5) Potensi pertahanan	Rp.	28,84 M
(6) Kekuatan pertahanan	Rp.	44,65 M

- 2) UO Mabes TNI 4 program : 1 Program Generik dan 3 Program Teknis dan 39 Kegiatan.
- a) Program generik :
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Integratif Rp. 2.638,61 M
- b) Program teknis : Rp. 2.835,97 M
- (1) Penggunaan Kekuatan Han Integratif Rp. 1.488,40 M
- (2) Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Integratif Rp. 1.115,55 M
- (3) Peningkatan Profesionalisme Prajurit Integratif Rp. 232,02 M
- 3) UO TNI AD 4 program : 1 Program Generik dan 3 Program Teknis dan 41 Kegiatan.
- a) Program generik :
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Matra Darat Rp. 15.873,53 M
- b) Program teknis : Rp. 4.855,00 M
- (1) Duk Kesiapan Matra Darat Rp. 2.185,77 M
- (2) Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Darat Rp. 2.199,50 M
- (3) Peningkatan Profesionalisme Prajurit Matra Darat Rp. 469,73 M
- 4) UO TNI AL 4 program : 1 Program Generik dan 3 Program Teknis dan 35 Kegiatan.
- a) Program generik :
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Matra Laut Rp. 4.292,35 M
- b) Program teknis : Rp. 4.538,00 M
- (1) Duk Kesiapan Matra Laut Rp. 1.279,34 M

- | | | |
|-----|---|----------------|
| (2) | Modernisasi Alutsista/non
Alutsista/Sarpras Matra Laut | Rp. 2.952,27 M |
| (3) | Peningkatan Profesionalisme
Prajurit Matra Laut | Rp. 306,39 M |
- 5) UO TNI AU 4 program : 1 Program Generik dan 3 Program Teknis dan 34 Kegiatan.
- a) Program generik :
- | | |
|--|----------------|
| Dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya Matra Udara | Rp. 2.383,68 M |
|--|----------------|
- b) Program teknis :
- | | |
|--|----------------|
| (1) Duk Kesiapan Matra Udara | Rp. 4.443,11 M |
| (2) Modernisasi Alutsista/non
Alutsista/Sarpras Matra Udara | Rp. 447,52 M |
| (3) Peningkatan Profesionalisme
Prajurit Matra Udara | Rp. 3.790,28 M |
| | Rp. 205,31 M |
- e. Berdasarkan Renstra Hanneg Tahun 2010-2014, rencana kebutuhan PHLN/KE Tahun 2011 sebesar USD 2,218,400.000, sedangkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 5.604,59 Miliar mencapai 25,2%; Rencana kebutuhan PDN Tahun 2011 sebesar Rp. 2.053,75 Miliar, sedangkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 800,00 Miliar mencapai 38,9%.

BAB V

PENUTUP

19. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Beberapa kegiatan yang harus dibatasi, yaitu :
- a. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya dan acara seremonial.
 - b. Pemasangan telepon baru, kecuali untuk Satker yang belum memiliki saluran telepon.

- c. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang Tupoksi (antara lain mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan).
 - d. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional seperti kendaraan taktis, khusus, tempur dan penggantian kendaraan rusak berat serta pembentukan Satuan Kerja baru.
 - e. Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa tersebut di atas.
 - f. Pergeseran anggaran kecuali sangat mendesak.
20. Penutup. Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011 merupakan dokumen yang harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan maupun Rancangan Rencana Kerja di lingkungan Unit Organisasi Kemhan dan TNI.

MENTERI PERTAHANAN,

PURNOMO YUSGIANTORO